
LAPORAN AWAL PERTUKARAN DATA
ANTAR PERANGKAT DAERAH
DAN PEMANFAATAN DATA ACUAN/INDUK

KABUPATEN ACEH TENGAH — SEMESTER I TAHUN 2026

Nomor Laporan	:	.../.../ Lap-Interoperabilitas/ 2026
Indikator Pemdi	:	I18 — Tingkat Kematangan Interoperabilitas Data (Level 1 — Initiate)
Dasar	:	Perbup No. 60/2022 (Satu Data Indonesia); Perbup No. 48/2025 (Arsitektur SPBE)
Periode Laporan	:	Januari s.d. Juni 2026
Penyusun	:	Bappeda (Walidata) & Diskominfo (Pengelola Infrastruktur)

I. Pendahuluan

Berdasarkan Perbup Aceh Tengah No. 60 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia dan Arsitektur SPBE (Perbup No. 48 Tahun 2025), Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyelenggarakan pertukaran data antar Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan layanan, dan satu acuan data. Laporan ini menyajikan pelaksanaan awal pertukaran data periode Januari—Juni 2026 sebagai bukti dukung Level 1 (Initiate) Indikator 18 — Interoperabilitas Data.

Sampai dengan periode laporan, mekanisme pertukaran data masih bersifat campuran: sebagian melalui file terjadwal (CSV/Excel), sebagian melalui layanan API sederhana, dan sebagian melalui permintaan langsung/surat-menyurat. Integrasi mesin-ke-mesin yang menyeluruh dan bus data terpusat belum sepenuhnya diterapkan dan menjadi target pengembangan level berikutnya.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sebagaimana diubah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi;
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Indikator Pemerintah Digital;
6. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 60 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Arsitektur SPBE.

III. Pemanfaatan Data Acuan/Induk (Master Data)

Pada tahap awal, pemanfaatan data acuan/induk yang digunakan lintas Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

No	Data Induk	Sumber/ Pengelola	PD Pengguna	Pemanfaatan	Mekanisme
1	Data kependudukan (NIK, KK)	Disdukcapil	Dinkes, Dindik, Dinsos, BKPSDM, DPMPTSP	Verifikasi NIK, penerima layanan, bantuan, NIP	Sinkronisasi terbatas/ekspor terenkripsi
2	Data wilayah administrasi (kode Kemendagri)	Bappeda/ Diskominfo	Seluruh PD	Acuan lokasi/kode wilayah	Referensi tetap/CSV
3	Data pegawai/ASN	BKPSDM	Seluruh PD	Administrasi kepegawaian, SSO	Sinkronisasi berkala/SSO
4	Data sekolah (NPSN)	Dindik	Bappeda, Dinsos	Perencanaan & bantuan	Ekspor/API (bertahap)
5	Data fasilitas kesehatan	Dinkes	Bappeda, BPBD	Perencanaan & mitigasi	Ekspor berkala
6	Data DTKS/bantuan sosial	Dinsos	Dukcapil, TNPK	Bantuan & verifikasi	Sinkronisasi dengan pusat
7	Data perizinan/NIB	DPMPTSP	Bappeda, DKUKMP	Investasi & perizinan	OSS/API (bertahap)
8	Data komoditas pangan	Diskominfo/ DKUKMP	TPID, Bappeda, masyarakat	Pemantauan inflasi	Aplikasi Bapokting + API OpenData

IV. Daftar Pertukaran Data Semester I Tahun 2026

No	Data	Dari	Kepada	Frekuensi	Mekanisme	Status
1	Rekap kehadiran ASN	Diskominfo (e-Absensi)	BKPSDM/e-Kinerja	Harian	API/CSV	Rutin
2	Data pegawai	BKPSDM	Diskominfo (SSO)	Bulanan	Sinkronisasi	Rutin

3	Harga komoditas	Diskominfo (Bapokting)	Bappeda/ OpenData	Harian	API/JSON	Rutin
4	Dataset OpenData	Bappeda (Walidata)	Portal pemkab	Bulanan/ insidentil	Unggah/API	Rutin
5	Data kependudukan (agregat)	Dukcapil	Bappeda/ Dinsos	Triwulan	Berkas terenkripsi (VPN)	Rutin
6	Layanan perizinan (info)	DPMPTSP	Portal pemkab	Bulanan	Tautan/ ekspor	Rutin
7	Data pendidikan (rekap)	Dindik	Bappeda	Triwulan	Ekspor Excel	Rutin
8	Data kesehatan (rekap)	Dinkes	Bappeda	Triwulan	Ekspor Excel	Rutin
9	Data bencana/kejadi an	BPBD	Bappeda/ Diskominfo	Insidentil	Pelaporan/ berkas	Rutin
10	Data aset	BPKAD	Bappeda	Semester	Ekspor	Rutin
11	Data PAD	Bapenda	BPKAD/ Bappeda	Bulanan	SIPD/ekspor	Rutin
12	Data PMKS/bantuan	Dinsos	Dukcapil/ TNPK	Insidentil	Berkas terenkripsi	Rutin

V. Mekanisme dan Saluran yang Digunakan

Mekanisme	Penggunaan	Jumlah/Persentase
Berkas terjadwal (CSV/Excel) via email/VPN/SFTP	Pertukaran data rutin yang belum memiliki API	± 50%
API/JSON (mesin-ke-mesin)	Pertukaran data terotomasi (absensi, Bapokting, OpenData)	± 25%
Sinkronisasi database	Data kepegawaian/SSO	± 10%
Permintaan langsung/surat	Pertukaran insidentil/data khusus/PDP	± 15%

VI. Penerapan Standar dan Metadata

- Sebagian besar data telah menggunakan kode referensi wilayah (Kemendagri) dan NIK sebagai acuan;
- Format data tabular menggunakan CSV/XLSX dengan encoding UTF-8; data spasial dalam Shapefile/GeoJSON;
- Metadata pada Portal OpenData sudah terisi untuk sebagian dataset;
- Pertukaran untuk data sensitif/PDP menggunakan saluran VPN/SFTP dan/atau berkas terenkripsi;
- Masih ada beberapa data yang belum sepenuhnya menerapkan metadata dan kamus data baku.

VII. Kendala yang Dihadapi

- Sebagian PD belum memiliki API/layanan data sehingga pertukaran masih berkas/manual;

- Standar format dan metadata belum sepenuhnya seragam antar-PD;
- Kualitas/pemutakhiran data bervariasi;
- Belum ada bus data/ESB terpusat;
- Sumber daya pengelola data dan pemahaman interoperabilitas masih perlu ditingkatkan.

VIII. Rencana Tindak Lanjut

No	Kegiatan	Output	Waktu	PJ
1	Penyusunan pedoman teknis interoperabilitas data	Pedoman (draft)	Triwulan III 2026	Diskominfo & Bappeda
2	Standarisasi metadata/kamus data lintas PD	Kamus data	2026—2027	Bappeda
3	Pengembangan API gateway dan perluasan API	API gateway	2027	Diskominfo
4	Perluasan sinkronisasi data kependudukan & kepegawaian	Layanan terintegrasi	2026—2027	Disdukcapil & BKPSDM
5	Integrasi penuh dengan OpenData dan portal layanan	Data terbuka terintegrasi	2027	Bappeda/ Diskominfo
6	Bimbingan teknis tata kelola & interoperabilitas data	Sertifikat, peserta terlatih	2026—2027	BKPSDM, Bappeda, Diskominfo

IX. Penutup

Demikian Laporan Awal Pertukaran Data antar Perangkat Daerah dan pemanfaatan data acuan/induk di Kabupaten Aceh Tengah disusun. Pada tahap awal ini, pertukaran data telah berlangsung untuk sejumlah data prioritas dengan berbagai mekanisme, namun masih perlu ditingkatkan menuju interoperabilitas yang menyeluruh. Rencana tindak lanjut akan dilaksanakan secara bertahap menuju level kematangan yang lebih tinggi.

Takengon, 30 Juni 2026

Kepala Bidang yang membidangi Data/E-Government,

(.....)

NIP.

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

(.....)

NIP.